



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4796-4805

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dampak Implementasi Kebijakan Who " *Strategic Preparedness And Response Plan (SPRP)* " Terhadap Perekonomian Di Indonesia Tahun 2021

Dimas Ramdhoni<sup>1✉</sup>, Bagus Subekti Nuswantoro<sup>2</sup>, Yeyen Subandi<sup>3</sup>

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta

Email: [dimas.ramdhoni13@gmail.com](mailto:dimas.ramdhoni13@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri sangat berakibat signifikan pada Indonesia, terutama pada bidang kesehatan masyarakat dan bahkan pada perekonomian global.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan WHO "Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP)" terhadap perekonomian di Indonesia pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan *library research*.. Dari penelitian implementasi SPRP mendapatkan hasil bahwa program SPRP ini memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit dan peningkatan sistem kesehatan, namun juga berdampak negatif pada sektor ekonomi seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketidakpastian di pasar keuangan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya upaya keberlanjutan dalam penanganan pandemi serta strategi pemulihan ekonomi yang komprehensif untuk meminimalkan dampak negatif.

Kata Kunci : *COVID-19, SPRP, Perekonomian Indonesia, Dampak Ekonomi, Pemulihan Ekonomi*

## Abstract

It cannot be denied that the COVID-19 pandemic has had a very significant impact on Indonesia, especially in the field of public health and even on the global economy. This research aims to analyze the impact of implementing the WHO "Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP)" policy on the economy in Indonesia in 2021. The research method used by the author is a qualitative descriptive analytical approach with library research. From the SPRP implementation research, the results showed that the SPRP program had a positive impact in preventing the spread of disease and improving the health system, but also had a negative impact on the economic sector such as a decline economic growth, unemployment, and uncertainty in financial markets. Recommendations that can be given are the need for sustainable efforts in handling the pandemic as well as a comprehensive economic recovery strategy to minimize negative impacts.

Keyword: *COVID-19, SPRP, Indonesian Economy, Economic Impact, Economic Recovery*

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan faktor penting dalam ekonomi dan pembangunan suatu negara, serta kedua aspek ini memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di Indonesia ini. Penyakit global yang baru berlalu seperti pandemic Covid-19, masalah lingkungan dan tantangan kesehatan lainnya juga memerlukan perhatian khusus dan memerlukan kerja sama internasional dalam pengimplementasiannya (Laksono et al., 2018).

Pada 11 Maret 2020, badan kesehatan dunia mengumumkan wabah COVID-19 sebagai krisis kesehatan global. Hal ini mengindikasikan penyebaran luas infeksi coronavirus di berbagai negara. Penyakit ini umumnya memiliki manifestasi klinis ringan hingga sedang, dengan gejala umum seperti batuk dan demam. Mayoritas individu yang terinfeksi pulih dalam hitungan minggu, meski beberapa kelompok berisiko tinggi dapat mengalami komplikasi serius (Covid-19, 2021).

Dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia terlihat jelas pada tahun 2021, dengan penurunan pertumbuhan sebesar 2,07%. Hal ini terutama disebabkan oleh munculnya varian Delta pada pertengahan tahun tersebut. Berbagai sektor seperti pariwisata, transportasi, perdagangan, dan jasa mengalami kemunduran signifikan. Tingkat kemiskinan pun meningkat dari 9,78% pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021 (Indonesia, 2024). Awal tahun 2021 menjadi periode yang penuh tantangan bagi pemulihan ekonomi nasional. Aspek kesehatan masih menjadi fokus utama, terutama dengan kemunculan varian Omicron. Namun, dibandingkan dengan penanganan varian Delta sebelumnya, Indonesia menunjukkan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi gelombang Omicron ini (Haspramudilla, 2022).

Setelah WHO mengumumkan bahwa Covid-19 merupakan pandemic global, WHO, mengeluarkan satu pedoman program yang bernama *Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP)*. SPRP ini berisi tentang rencana strategis untuk mendeteksi, mempersiapkan dan merespon wabah Covid-19 baik di tingkat global atau nasional. Program ini kemudian dilengkapi dengan *Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response* yang dirilis WHO pada 12 Februari 2020. Panduan rencana operasional berisi tentang panduan praktis yang dapat digunakan oleh negara anggota WHO, termasuk Indonesia untuk mengembangkan rencana penanganan Covid-19 di tingkat nasional. (Organization, 2021)

*Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP)* adalah program untuk menanggapi pandemi COVID-19 secara global. SPRP merupakan kerangka kerja yang mengarahkan upaya WHO dan mitra untuk mendukung negara-negara dalam menanggapi pandemi. Tujuan utama SPRP adalah untuk menekan penularan COVID-19, mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi, serta melindungi yang rentan.

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dijelaskan, maka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah teori rezim internasional. Teori rezim internasional digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana Dampak Implementasi Kebijakan WHO *Strategic Preparedness Response Plan (SPRP)* Terhadap Perekonomian di Indonesia Tahun 2021. Dengan menggunakan teori rezim internasional dalam penelitian ini menjadi tolak ukur dalam menganalisis Indonesia terhadap implementasi kebijakan WHO sebagai rezim kesehatan internasional.

Krasner menjelaskan rezim internasional sebagai salah satu tempat untuk mewujudkan kepentingan bersama para aktor yang terlibat dari berbagai negara dan guna untuk menghadapi masalah bersama dengan hasil yang diharapkan dari terbentuknya rezim tersebut (Krasner, 1983). Dengan kata lain, rezim internasional merupakan abstraksi kekuasaan yang kemudian menghasilkan suatu norma atau peraturan yang disahkan oleh para pembuat yang terlibat guna mencapai suatu kepentingan bersama dari sekelompok negara.

Teori rezim internasional dalam hubungan internasional merujuk pada pandangan bahwa kerja sama antarnegara dapat terjadi melalui pembentukan aturan, norma, dan prosedur bersama yang disebut rezim. Dalam konteks penanganan pandemi seperti Covid-19, rezim internasional yang relevan adalah rezim kesehatan global seperti *World Health Organization (WHO)* yang berperan dalam koordinasi upaya penanganan pandemi dan pengembangan standar internasional terkait kesehatan.

WHO mengeluarkan *Strategic Preparedness and Response Plan* (SPRP) COVID-19 untuk tahun 2021 dan dokumen yang menyertainya sebagai paket acuan yang bertujuan untuk memandu tindakan terkoordinir yang harus di ambil pada tingkat nasional, regional, dan global untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung dalam menanggapi COVID-19, mengatasi ketidaksetaraan, dan merencanakan jalan keluar dari pandemic.

Melalui SPRP, WHO menetapkan norma perilaku yang diharapkan dari negara anggota dalam aspek surveillance epidemiologi, deteksi kasus, manajemen klinis, vaksinasi, hingga komunikasi publik terkait pandemi. WHO juga menyediakan kerangka prosedur baku seperti protokol karantina, definisi kasus suspek dan konfirmasi COVID-19, serta mekanisme pelaporan kasus antar negara. Selain itu, SPRP memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif dan koordinasi respons global, misalnya melalui penyediaan platform khusus untuk berbagi informasi real-time antar negara dan WHO, rekomendasi kebijakan perjalanan internasional, hingga alokasi dan distribusi vaksin secara adil. WHO berperan mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan logistik dan kemanusiaan negara anggota melalui SPRP.

Strategi ini penting untuk memutus rantai penularan COVID-19 sehingga mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat pulih kembali. WHO mendukung program vaksinasi nasional melalui bantuan cold chain, tenaga kesehatan, dan sosialisasi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Hingga akhir 2021, sekitar 128 juta orang di Indonesia sudah divaksinasi dosis lengkap.

## METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif. Tujuannya adalah mengkaji suatu fenomena secara rinci melalui eksplorasi komponen-komponen objek penelitian, pemetaan topik, verifikasi sumber informasi yang kredibel, serta evaluasi yang didasarkan pada kerangka konseptual yang relevan. Metodologi ini selaras dengan pandangan Creswell, yang menekankan bahwa dalam pendekatan deskriptif-analitis, aspek-aspek realitas dalam konteks sosial akan ditelaah dan didalami, menghasilkan kesimpulan komprehensif terhadap fenomena yang dikaji (Creswell & Creswell, 2018). Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode riset kepustakaan, dengan seleksi sumber yang dibagi menjadi primer dan sekunder. Sumber utama mencakup publikasi statistik tahunan dari instansi pemerintah, dokumen strategis penanganan Covid-19 (SPRP 2021), serta laporan resmi Kementerian Luar Negeri.

Sementara itu, sumber pendukung diperoleh dari literatur ilmiah terkini, meliputi buku akademik, jurnal, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, baik dalam skala nasional maupun global. Kerangka teoritis yang digunakan

adalah konsep rezim internasional, yang menjadi landasan untuk menganalisis perilaku negara sebagai entitas politik mandiri dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Perspektif ini diaplikasikan untuk mengevaluasi efektivitas pedoman *Strategic Preparedness and Response Plan*. (SPRP) dalam mengatasi krisis pandemi global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wabah Covid-19 telah mengakibatkan penyusutan ekonomi yang mengharuskan penyesuaian dari berbagai pihak, termasuk pelaku dan pembuat kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi baru yang selaras dengan pola perilaku masyarakat yang telah berubah. Pemerintah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi risiko kesehatan akibat pandemi sambil tetap berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi positif. Langkah-langkah ini mencakup pemberian insentif kesehatan, penerapan protokol kesehatan, serta implementasi pembatasan sosial dalam skala besar.

Restriksi sosial berskala luas berdampak signifikan terhadap kegiatan dan pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk program kartu prakerja dan memperluas cakupan perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong perputaran konsumsi dan produksi, serta meningkatkan output nasional. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada beban biaya konsumsi masyarakat melalui kebijakan pelonggaran kredit dan pemberian insentif tarif listrik untuk membantu perekonomian yang terpukul keras.

Penerapan pembatasan sosial berskala besar dan penutupan layanan publik mengakibatkan krisis ganda - krisis ekonomi dan kesehatan. Banyak pekerja produktif terpaksa bekerja dari rumah untuk jangka waktu tertentu, diberhentikan sementara, atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. (PHK) (Putranto et al., 2021).

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan guncangan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan dan menjaga stabilitas perekonomian. Kondisi ini menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku ekonomi (Sumarni, 2020). Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan moneter yang bersinergi dengan bank sentral, serta memperkuat paradigma reformasi kebijakan sejak awal pandemi. Selain upaya stabilisasi nilai tukar dan harga, bank sentral juga diberi mandat tambahan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat arus modal asing dan aspek makroprudensial (Ismal, 2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasikan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk menerapkan pembatasan pergerakan nasional, bahkan selama program vaksinasi berlangsung. Mengingat keterbatasan pasokan vaksin, pemerintah Indonesia menerapkan strategi vaksinasi Covid-19 secara bertahap. Di antara berbagai vaksin yang tersedia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) untuk tiga jenis vaksin: Sinovac, Oxford-AstraZeneca, dan Sinopharm (Lara, 2022).

Tujuan utama vaksinasi adalah untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) terhadap Covid-19, yang diharapkan dapat melindungi bahkan mereka yang tidak dapat divaksinasi karena kondisi tertentu. Diperkirakan sekitar 60-80% populasi perlu memiliki kekebalan untuk mencapai efek ini. Dalam upaya mengendalikan pandemi global, WHO telah menerbitkan pedoman berjudul "*COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP)*" (Organization, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi peningkatan kasus Covid-19. Beberapa langkah yang diterapkan secara konsisten meliputi: 1) kewajiban penggunaan masker di tempat umum; 2) pelacakan kontak kasus positif menggunakan tes cepat; 3) persiapan isolasi mandiri dan edukasi bagi mereka yang hasil tesnya negatif namun menunjukkan gejala, atau positif berdasarkan tes cepat; 4) isolasi di rumah sakit jika isolasi mandiri tidak memungkinkan. Strategi dasar dalam menangani pandemi adalah penerapan jaga jarak fisik. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan program Jaring Pengaman Sosial untuk membantu masyarakat menghadapi dampak ekonomi pandemi (Ikmal & Noor, 2022).

Menghadapi konsekuensi ekonomi pasca pandemi, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi internasional, solidaritas global, dan kerjasama, termasuk implementasi langkah-langkah nyata dalam penanganan wabah, guna memulihkan perekonomian yang sangat krusial (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Strategi diplomasi ekonomi negara akan berfokus pada mengatasi hambatan pengembangan sektor kesehatan menuju kemandirian, mendukung inisiatif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan mewujudkan ketahanan kesehatan yang diprioritaskan pada upaya kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Pendekatan diplomatik dilakukan melalui berbagai tingkatan - bilateral, regional, dan multilateral - dengan mengidentifikasi mitra potensial dari kalangan negara, lembaga internasional, sektor swasta, serta mengawal perjanjian internasional. Selain itu, penguatan investasi dan peningkatan daya saing industri kesehatan juga menjadi fokus untuk mencapai kemandirian nasional dan ketahanan kesehatan, termasuk upaya mendaftarkan produk farmasi Indonesia di negara mitra

(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Inisiatif Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diimplementasikan melalui empat mekanisme dan pengeluaran negara: 1) penyertaan modal negara; 2) alokasi dana; 3) investasi pemerintah; dan 4) skema penjaminan yang ditetapkan oleh pemerintah. Rencana ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020 yang disahkan pada 9 Mei 2020 (Mackenzie & Smith, 2020).

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82/2020 pada 27 Juli 2020, yang mengatur tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Struktur komite ini terdiri dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Komite Kebijakan, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Secara umum, pelaksanaan program PEN didukung oleh berbagai upaya percepatan, termasuk akselerasi belanja untuk menangani COVID-19, mempercepat program PEN lainnya seperti insentif usaha, Dana Insentif Daerah (DID) Pemulihan, DAK Fisik, dan Pra Kerja. Selain itu, optimalisasi program-program baru yang dapat segera direalisasikan, seperti Bantuan Produktif UMKM (BPUM) dan Subsidi Gaji/Upah, juga menjadi bagian dari strategi ini (Ikmal & Noor, 2022).

Melalui PEN pemerintah menggalakkan program yang mendorong konsumsi masyarakat agar kesempatan kerja mulai terbuka kembali dan ekonomi terus berputar. Yang menjadi permintaan tertinggi dalam konsumsi yaitu, konsumsi rumah tangga dengan menyumbang 57,6%. Peringkat kedua disumbang oleh investasi sebesar 31,6% (Moegiarsa, 2021). Ekonomi di Indonesia mulai menampakkan indikator positif pada kuartal ke IV 2020. Dimana pada kuartal ke IV 2020 impor bahan baku meningkat dan beberapa usaha mulai berjalan. Maka menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendorong investasi mulai dari awal tahun 2021. Sebab produk tambang dan beberapa komoditas minyak kelapa sawit di pasar asing memiliki harga bersaing.

Respons pemerintah terhadap krisis COVID-19 telah memicu munculnya inovasi bisnis dan peluang wirausaha baru untuk mempertahankan aktivitas ekonomi. Transformasi model bisnis ini terlihat dari meningkatnya penggunaan platform *e-commerce*, utilitas digital, dan transaksi ekonomi daring. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah lonjakan popularitas layanan antar makanan berbasis aplikasi (Sonya Sidjabat, 2021). Kemunculan berbagai platform digital yang mendukung UMKM juga mencerminkan adaptabilitas pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi dalam menghadapi pandemi. Para pelaku ekonomi berhasil menemukan keseimbangan dan pola kerja baru di tengah situasi yang menantang, menunjukkan fleksibilitas yang tinggi (Imam Pamungkas Walton & Nurmandi, 2021). Meskipun belum seoptimal kondisi pra-pandemi, perkembangan ini membangkitkan

optimisme akan tercapainya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi baru di era pandemi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang 2021 berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,69%, meningkat signifikan dibandingkan kontraksi 2,07% pada tahun 2020. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp62,2 juta atau setara dengan 4.349,5 USD (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Analisis pertumbuhan ekonomi kuartal-ke-kuartal dari 2018 hingga 2020 menunjukkan pola kontraksi pada triwulan IV. Namun, tren ini berubah pada triwulan IV-2021, di mana ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 1,06%. Fenomena ini terjadi setelah perlambatan aktivitas ekonomi pada triwulan III akibat lonjakan kasus COVID-19 dan pembatasan mobilitas. Dari sisi produksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) memimpin dengan pertumbuhan 33,00% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 mengalami ekspansi sebesar 5,02% (year-on-year). Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi pendorong utama pertumbuhan dari sisi produksi dengan kenaikan 12,16%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menunjukkan kinerja paling impresif dengan pertumbuhan 29,83% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis dampak implementasi Kebijakan WHO "*Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP)*" terhadap perekonomian di Indonesia tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam kerangka kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor ekonomi di negara ini. Implementasi SPRP tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak positif dapat dilihat dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit, peningkatan sistem kesehatan, dan efisiensi dalam menangani krisis kesehatan global. Namun, seiring dengan hal tersebut, terdapat pula dampak negatif terutama terkait dengan sektor ekonomi, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketidakpastian di pasar keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Covid-19, S. T. P. (2021). *Apa yang Dimaksud Pandemi*. 2021.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- GHSA. (2024, Januari 17). *Sekilas GHSA*. From <https://ghsaindo-nesia.wordpress.com/about/>
- Haspramudilla, D. (2022). Dinamika Enomomi Global dan Pengaruhnya Bagi Indonesia. 9.
- Ikmal, N. M., & Noor, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 155 – 167. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910>
- Imam Pamungkas Walton, & Nurmandi, A. (2021). Strategi Bertahan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), 154–168. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.117>
- Indonesia, K. K. (2024, Januari 19). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*. From Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- Informasi, K. K. (2024, Januari 18). *BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69 Persen Pada 2021*. From Kementerian Keuangan Indonesia: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39835/bps-catat-ekonomi-indonesia-tumbuh-369-persen-pada-2021/0/berita>
- Ismal. (2020). Kuliah Umum: Strategi Kebijakan Moneter. Dalam Percepatan Pemulihan Perekonomian Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Bersiap Hadapi Tantangan 2022. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–132. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 1–198
- Kesehatan, K. (2024, Januari 17). *AS Apresiasi Peran Indonesia dalam Global Health Security Agenda*. From <http://www.dep kes.go.id/article/view/17052200001/as-apresiasi-peran-indonesia-dalam-global-health-security-agenda-.html>
- Krasner, S. D. (1983). Structural Causes and Regime Consequence. 19.
- Laksono, H., Maryadi, P., Dewi, E. D., Aryadi, T., Santikajaya, A., Fitri, W., & Putro, robertus A. (2018). Kesehatan untuk Semua : Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia. In *Jakarta*.
- Lara. (2022). No Title2003, 8.5.2017, הארץ. הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים–2005.

www.aging-us.com

- Mackenzie, J. S., & Smith, D. W. (2020). COVID-19—A Novel Zoonotic Disease: A Review of the Disease, the Virus, and Public Health Measures. *Asia-Pacific Journal of Public Health, 32*(4), 145–153. <https://doi.org/10.1177/1010539520931326>
- Moegiarso. (2021). Daya Ungkit Ekonomi Bangkit.
- Multilateral, P. P. (2018). *Kesehatan untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Organization, W. H. (2021). *COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP 2021)*. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02>
- Putranto, J. H., Subagyo, T., Lestari, S., Ekonomi, T., & Kebijakan, A. (2021). *Pandemi COVID-19: Analisis Tantangan Kebijakan Ekonomi di Indonesia " Covid – 19 Pandemic : Analysis of Economic Policy Challenges in Indonesia . "* *23*(01), 69–76.
- Sonya Sidjabat. (2021). Strategi Pelaku Usaha dalam Menghadapi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Stiami, 8*, 5.
- Sumarni. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis.
- Wibowo, K., Sarjana, S. H., & Jayakarta, S. (2022). Post-Pandemi Covid-19 Economic Recovery, Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 03*(02).